

Laporan



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



INDONESIAN  
TREASURY



# Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara

RAKORDA  
PELAKSANAAN ANGGARAN  
PUSAT & DAERAH  
PROVINSI RIAU 2024

"Sinergi Pemerintah  
untuk Kemandirian Fiskal"

Seminar Kemandirian  
Fiskal di Provinsi Riau



Triwulan II  
2024



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA





## Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kuasa dan izin-Nya, kami dapat merilis Laporan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) periode Triwulan II Tahun 2024 ini.

Penerbitan Laporan FKPKN ini dapat dijadikan sebagai salah satu *amplifier tools* pelaksanaan tugas Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau sebagai representasi Kementerian Keuangan dan *Regional Chief Economist* (RCE) di Riau. FKPKN diharapkan dapat menjadi media penyampaian kebijakan-kebijakan pemerintah pusat ke daerah maupun kebijakan daerah dengan meningkatkan sinergi, koordinasi, kolaborasi dan kerja sama khususnya pada aspek pengelolaan keuangan negara.

Untuk memenuhi prinsip holistik, peningkatan kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, peningkatan sinergi, koordinasi, kolaborasi dan kerja sama dilaksanakan dalam wadah Kemenkeu Satu dengan melibatkan seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan lainnya kepada seluruh *stakeholders* langsung seperti pemerintahan daerah, masyarakat, satuan kerja, Badan Layanan Umum/Daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya di wilayah Riau sehingga menjadi salah satu *input* dalam rangka penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan di level pusat.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau



Ditandatangani secara elektronik

**Heni Kartikawati**

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	2
<i>Executive Summary</i> .....	4
A. Latar Belakang .....	5
B. Identifikasi Permasalahan.....	6
C. Kegiatan Periodik.....	8
D. Kegiatan Tematik.....	27
E. Kegiatan <i>Local Expert</i> .....	32
F. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	35
Lampiran.....	37

## Executive Summary

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) saat ini mengemban tugas dan kewenangan yang sangat luas sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah serta sebagai *Regional Chief Economist (RCE)* dan *Financial Advisor* di daerah. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Kanwil DJPb perlu membangun kerja sama/kemitraan dengan berbagai *stakeholders*. Kerja sama/kemitraan tersebut saat ini diwadahi dalam Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN).

Pada FKPKN Triwulan II Tahun 2024 ini, telah dilaksanakan tiga jenis kegiatan, yaitu kegiatan *periodik*, kegiatan *tematik*, dan kegiatan *local expert*. Kegiatan-kegiatan tersebut di-*highlight* pada berbagai isu yang menjadi perhatian, seperti peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran pusat dan daerah melalui keikutsertaan dalam Musrenbang RPJMD dan RKPD Provinsi Riau dan audiensi dengan para *stakeholders*, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana Transfer Ke Daerah (TKD), keikutsertaan dalam penyusunan petunjuk teknis penyusunan LSKP Korporasi Publik, peningkatan kualitas layanan publik melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sinergi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengendalian inflasi daerah, percepatan akses keuangan daerah, dan *Treasury Goes to Campus*.

Kegiatan tematik pada FKPKN Triwulan II Tahun 2024 mengangkat tema “Peningkatan Sinergi Pusat-Daerah untuk Pengelolaan Keuangan yang Lebih Baik”. Kanwil DJPb sebagai *Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor* turut mengawal perencanaan dan pengesahan RPJMD dan RKPD Provinsi Riau melalui keikutsertaan dalam Musrenbang, edukasi dan sosialisasi literasi dan inklusi keuangan syariah, peluang investasi daerah, serta menginisiasi kegiatan koordinasi teknis dan rapat tingkat *deputies* bersama Kemenkeu Satu dan *local expert*.

FKPKN Triwulan II Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjembatani kebutuhan dan menyelaraskan langkah dalam membangun kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Riau. Kanwil DJPb Provinsi Riau bersama Kemenkeu Satu Riau memiliki peran dalam asistensi penyelesaian berbagai isu/permasalahan perekonomian dan fiskal di daerah yang dituangkan dalam laporan FKPKN Triwulan II Tahun 2024 ini. Sinergi dan kolaborasi yang baik diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Riau.

## A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terciptanya pengelolaan keuangan negara yang tertib, efisien, transparan dan bertanggung jawab, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah dan sebagai *Regional Chief Economist* (RCE) perlu membangun kerja sama/kemitraan dengan berbagai *stakeholders*. Hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan sinergi dan keselarasan pengelolaan keuangan negara di daerah.

Salah satu bentuk kerja sama/kemitraan yang dapat diinisiasi dan dibangun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara atau disebut FKPKN yang dapat menjadi komponen penting sebagai wadah koordinasi, komunikasi, konsultasi terlibat pengelolaan keuangan dengan semua *stakeholders* baik pusat maupun daerah.

Dengan demikian diharapkan forum ini menjembatani kebutuhan dan kesamaan langkah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan negara yang tertib, efisien, transparan, dan bertanggungjawab.

Pelaksanaan FKPKN pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan bertujuan untuk:

1. Memenuhi kebutuhan data, analisis, dan informasi terkait penerimaan, belanja, pembiayaan, dan kebutuhan kas lingkup regional sebagai *input* bagi penyusunan kebijakan;
2. Memupuk koordinasi, kerja sama, dan *sharing* data dan informasi berbagai instansi dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan negara yang tertib, efisien, transparan, dan bertanggungjawab;
3. Penajaman peran Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah dalam pelaksanaan APBN serta analisis ekonomi dan fiskal di daerah;
4. Peningkatan kemampuan Kanwil DJPb dalam membaca, menganalisis, dan menyajikan data serta menyusun rekomendasi pengambilan keputusan; serta
5. Peningkatan kualitas kajian dan analisis Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan sebagai salah satu *input* untuk formulasi dan pengambilan kebijakan di daerah dan di pusat.

## B. Identifikasi Permasalahan

Meningkatnya kebutuhan koordinasi, kerja sama, *sharing* data dan informasi berbagai instansi dalam membangun perekonomian daerah khususnya dinamika perekonomian daerah, perubahan peraturan dan kebijakan, dan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, upaya pengendalian inflasi daerah, meningkatkan kualitas UMKM, serta arahan untuk meningkatkan kualitas kajian dan analisis agar bermanfaat untuk memberikan rekomendasi pengambilan kebijakan di daerah dan pusat membuat peran Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai *Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor* melalui FKPN perlu terus ditingkatkan.

Pelaksanaan koordinasi, kerja sama, *sharing* data dan informasi dilaksanakan secara rutin maupun tematik. Berikut isu/permasalahan dan peran/kontribusi Kanwil DJPb Provinsi Riau dan Kemenkeu Satu pada triwulan II tahun 2024.

No	Isu/ Permasalahan	Peran/Kontribusi/Tindak Lanjut Kanwil DJPb/Kanwil Kemenkeu
1	Meningkatkan hasil kajian/ analisis terkait laporan Kanwil DJPb Provinsi Riau sebagai TREFA, penerimaan pajak, dan pemberdayaan UMKM, serta publikasi ke masyarakat.	Koordinasi dalam bentuk kelompok kerja <i>Regional Chief Economist</i> , penerimaan, dan UMKM, ALCo Regional bersama Kemenkeu Satu, <i>local expert</i> , dan <i>stakeholders</i> lainnya. Pelaksanaan diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR), <i>Government Finance Statistics</i> (GFS), dan <i>press release</i> APBN KiTA Provinsi Riau.
2	Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran pusat dan daerah	Diadakan pembinaan, monev, sosialisasi, koordinasi, rapat, FGD bersama <i>key stakeholder</i> daerah terkait pelaksanaan anggaran pusat dan daerah.
3	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana Transfer ke Daerah (TKD)	Kanwil DJPb Provinsi Riau memberikan saran atas permasalahan yang dihadapi pemda, melalui kunjungan, dialog dan FGD terkait kendala yang dihadapi serta langkah strategis dan solusi agar dapat dilaksanakan percepatan realisasi TKD.
4	Asistensi dan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah (pemda)	Dengan adanya koordinasi dan diskusi, pemda menjadi <i>aware</i> untuk bersinergi terkait informasi keuangan daerah, baik penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan Laporan Keuangan. Kanwil DJPb Provinsi Riau juga memberikan rekomendasi nyata atas permasalahan terkait akuntansi dan pelaporan keuangan pemda.
5	Percepatan akses keuangan daerah	Berpartisipasi aktif dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kota Dumai, dan Kab. Pelalawan.

6	Peningkatan kualitas layanan publik melalui Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Pendampingan penyusunan laporan keuangan BLU, evaluasi kinerja BLU dan langkah-langkah strategis BLU, dan asistensi pembinaan BLUD.
7	Pengendalian inflasi daerah Provinsi Riau	Kanwil DJPb tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan rutin melaksanakan rapat mingguan untuk membahas inflasi dan berkontribusi melalui kebijakan fiskal pemerintah.
8	Peningkatan Sinergi Pusat-Daerah untuk Pengelolaan Keuangan yang Lebih Baik	Pembahasan analisis tematik berupa keikutsertaan dalam Musrenbang RPJMD dan RKPD Provinsi Riau dan sosialisasi mengenai literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah .

## C. Kegiatan Periodik

Kegiatan periodik merupakan kegiatan yang selama ini dilakukan secara rutin oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi baik sebagai Kanwil Ditjen Perbendaharaan maupun sebagai *Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor* di regional Riau. Bidang kegiatan FKPN meliputi:

1. Fungsi Pelaksanaan Anggaran
2. Fungsi Pengelolaan Kas Negara
3. Fungsi Pembinaan Pengelolaan Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/BLUD)
4. Fungsi Manajemen Investasi
5. Fungsi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
6. Fungsi Sistem Perbendaharaan dan Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

Kegiatan periodik yang dilakukan dalam triwulan II tahun 2024 antara lain:

### 1. Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau



#### Waktu dan tempat:

Setiap minggu di Kantor Gubernur Riau.

#### Unit yang terlibat:

Tim TPKAD Provinsi Riau yang terdiri dari Kanwil DJPb Provinsi Riau, Setda Provinsi Riau, perwakilan OJK, dan perbankan.

#### Rincian kegiatan:

- a) Kanwil DJPb Provinsi Riau diwakili oleh Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II menghadiri Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Riau di Riau Command Center, Kantor Gubernur Riau.
- b) Agenda rapat ialah mengikuti Rapat Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara daring yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pada rapat tersebut disoroti mengenai Inflasi tahun 2023 di tingkat nasional cukup terkendali yaitu sebesar 2,61%, masih dalam batas target yang ditetapkan pemerintah yaitu  $2,5 \pm 1 \%$ .
- c) Penutup oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Riau.

#### Hasil yang dicapai:

Koordinasi dan sinergi antar kementerian, lembaga, serta pemda ini sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan, menjamin ketersediaan dan stabilisasi pangan, serta perbaikan distribusi pangan ke masyarakat sehingga kenaikan harga dapat terkendali.

### 2. Rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pekanbaru



#### Waktu dan tempat:

Setiap minggu di Kantor Pemerintah Kota Pekanbaru.

#### Unit yang terlibat:

Tim TPID Kota Pekanbaru yang terdiri dari Kanwil DJPb Provinsi Riau, Bagian perekonomian kota pekanbaru, perwakilan OJK, dan peserta rapat lainnya.

#### Rincian kegiatan:



Kanwil DJPb Provinsi Riau diwakili oleh Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II yang merupakan bagian dari TPID kota Pekanbaru menghadiri Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pekanbaru di Kantor Pemerintah Kota Pekanbaru. Agenda dipimpin oleh Setda Kota Pekanbaru. Rapat tersebut disoroti mengenai Inflasi Kota Pekanbaru dan menjaga dalam batas target yang ditetapkan pemerintah yaitu  $2,5 \pm 1$  %. Acara ditutup dengan dengar pendapat antar peserta untuk menjaga inflasi harga komoditas terutama komoditas pangan.

#### **Hasil yang dicapai:**

Koordinasi dan sinergi antar instansi seperti pemerintah kota Pekanbaru sebagai penanggung jawab, para UPT, dan instansi lainnya seperti Kanwil DJPb Provinsi Riau dalam mengetahui capaian anggaran dalam menyelesaikan permasalahan untuk menjamin ketersediaan dan stabilisasi pangan, serta perbaikan distribusi pangan ke masyarakat sehingga kenaikan harga dapat terkendali. Selain itu, kerjasama antara anggota TPID dan masyarakat, Kota Pekanbaru dinobatkan menjadi salah satu kota yang berhasil mengendalikan inflasi di daerah oleh Presiden pada tahun 2024.

### **3. Kunjungan ke Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu**



#### **Waktu dan tempat:**

Jumat, 19 April 2024 di Kantor Bupati Indragiri Hulu.

#### **Unit yang terlibat:**

Kanwil DJPb Provinsi Riau, KPPN A2 Rengat, dan Sekretaris daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

#### **Rincian kegiatan:**

Kegiatan diawali dengan penyampaian maksud dan tujuan kedatangan tim Kanwil DJPb Provinsi Riau oleh Ibu Heni Kartikawati selaku Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau. Dalam kunjungan tersebut,

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau menyampaikan perkembangan kinerja keuangan Kab. Indragiri Hulu kepada Sekda beserta kepala dinas terkait meliputi kinerja Transfer ke Daerah (TKD), kualitas pelaporan keuangan daerah, serta Dinamika Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Acara diakhiri dengan diskusi permasalahan keuangan di Kabupaten Indragiri Hulu dan penyampaian rekomendasi langkah oleh tim Kanwil DJPb Provinsi Riau.

#### **Hasil yang dicapai:**

Kegiatan ini meningkatkan sinergi antar Kanwil DJPb Provinsi Riau dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu, melalui kegiatan ini Kanwil DJPb Provinsi Riau dapat memotret dan membantu permasalahan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

#### 4. Kunjungan Kerja Ke Sekretaris Daerah Provinsi Riau



**Waktu dan tempat:**

Rabu, 24 April 2024 di Kantor Gubernur Provinsi Riau.

**Unit yang terlibat:**

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Kanwil DJPb Provinsi Riau dan tim.

**Rincian kegiatan:**

Kegiatan diawali dengan penyampaian maksud dan tujuan kedatangan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Ibu Heni Kartikawati. Selanjutnya, beliau memaparkan mengenai kinerja pelaksanaan anggaran khususnya terkait dengan realisasi anggaran

dan Tranfer ke Daerah dan peran Kanwil DJPb selaku Financial Advisory (FA) yang siap memberikan bantuan konsultansi bagi pemerintah daerah apabila menghadapi kendala dalam pelaksanaan anggaran di daerahnya ataupun sharing knowledge dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Acara ditutup dengan diskusi dan rencana kolaborasi kegiatan dengan pemerintah provinsi Riau.

**Hasil yang dicapai:**

Melalui kunjungan ini, Kanwil DJPb Provinsi Riau meningkatkan sinergi dengan pemerintah provinsi Riau. Selain itu, kunjungan ini merupakan awal dari kolaborasi dan harmonisasi langkah untuk kegiatan di masa mendatang bersama dengan pemerintah daerah Provinsi Riau.

#### 5. Audiensi Bersama Rektor Universitas Riau



**Waktu dan tempat:**

Kamis, 25 April 2024 di Kanwil DJPb Provinsi Riau.

**Unit yang terlibat:**

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau dan tim dan Rektor Universitas Riau (UNRI) dan rombongan.

**Rincian kegiatan:**

Kegiatan ini merupakan silaturahmi dan kepada Kanwil DJPb Provinsi Riau. Kunjungan ini disambut baik oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Ibu Heni Kartikawati. Kegiatan dilanjutkan dengan

diskusi ini yang membahas mengenai evaluasi kinerja anggaran Universitas Riau pada tahun sebelumnya, outlook kinerja anggaran Universitas Riau di tahun 2024, dan rencana Kanwil DJPb Provinsi Riau dalam melakukan pendampingan dalam pengisian *maturity rating* BLU Universitas Riau periode pelaporan tahun 2023. Kegiatan ditutup dengan diskusi mengenai kendala-kendala yang dihadapi UNRI dalam pengelolaan BLU dan solusi yang ditawarkan oleh Kanwil DJPb Provinsi Riau.

**Hasil yang dicapai:**

Melalui kegiatan ini, Kanwil DJPb Provinsi Riau meningkatkan hubungan kerja sama dengan Universitas Riau selaku *stakeholder* dan instansi yang dibina khususnya dalam pengelolaan BLU. Selain itu, kunjungan ini dapat menjadi awal dari kolaborasi dan harmonisasi langkah untuk mendorong UNRI sebagai BLU yang kuat dengan kualitas layanan pendidikan bersaing di Provinsi Riau.

## 6. Kunjungan Kerja ke KPPN Rengat



### Waktu dan tempat:

Kamis s.d. Jumat, 18-19 April 2024 di KPPN A2 Rengat.

### Unit yang terlibat:

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau dan tim serta para pejabat/pegawai KPPN A2 Rengat.

### Rincian kegiatan:

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Ibu Heni Kartikawati. Beliau menyampaikan apresiasi kepada para pegawai di KPPN A2 Rengat yang telah mencapai kinerja yang maksimal di tengah keterbatasan jumlah SDM. Acara

dilanjutkan dengan sosialisasi dengan tema *The Importance of Data Analytics* yang disampaikan oleh Bapak Hilman Satria. Acara ditutup dengan diskusi bersama dengan para pejabat/pegawai di KPPN A2 Rengat.

### Hasil yang dicapai:

Kunjungan ini merupakan pelaksanaan tugas pembinaan terkait kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat. Selain itu, kunjungan ini dapat meningkatkan sinergi dan harmonisasi langkah dalam pelaksanaan tugas antara kanwil DJPb Provinsi Riau dengan KPPN A2 Rengat.

## 7. Audiensi Pj. Gubernur Riau dan Penyampaian Kinerja Transfer ke Daerah



### Waktu dan tempat:

Kamis, 2 Mei 2024 di Kantor Gubernur Provinsi Riau.

### Unit yang terlibat:

Kanwil DJPb Provinsi Riau, para kepala KPPN lingkup Riau, dan pemerintah provinsi Riau.

### Rincian kegiatan:

Kegiatan diawali dengan kata pembukaan dari kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Ibu Heni Kartikawati. Dalam opening speechnya, beliau menyampaikan antara lain a) maksud dan tujuan kedatangan

rombongan; b) realisasi kinerja transfer ke daerah yang telah disalurkan di seluruh kabupaten/kota serta Provinsi Riau; c) peraturan terbaru DAK Fisik dan perkembangan penyaluran Dana Desa serta data desa yang terlambat dalam penyaluran; d) penyampaian rencana pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah APBN dan APBD di awal Juni 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, Pj. Gubernur menyambut baik kedatangan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau dan tim. Beliau menyampaikan bahwa akan mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat pengajuan dokumen syarat salur, sehingga dana-dana tersebut dapat terserap optimal. Pada kesempatan itu juga disampaikan mengenai beberapa rencana event di bulan Mei 2024 yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau seperti Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBI dan BBWI), Festival Lancang Kuning, dan mengundang Kanwil DJPb dalam Rakornas Dana Desa yang dihadiri 1.591 kepala desa di seluruh Riau.

### Hasil yang dicapai:

Dari audiensi ini, Kanwil DJPb Provinsi Riau meningkatkan sinergi dengan pemerintah provinsi Riau dan kesepakatan kerjasama dalam upaya penyaluran TKD dan kegiatan seperti Rakorda yang akan segera diselenggarakan.

## 8. Penilaian IKPA Tahun 2024 dan Pembahasan Alih Guna BMN Rumah Negara



### Waktu dan tempat:

Jumat, 3 Mei 2024 di ruang kerja Kapolda, lantai 5 Mapolda Riau.

### Unit yang terlibat:

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Biromadan Sekjen Kemenkeu, dan Kapolda Riau.

### Rincian kegiatan:

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Ibu Heni Kartikawati. Beliau menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan. Dalam audiensi ini, beliau dan tim membahas pokok bahasan, yaitu terkait kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Polda Riau serta isu alih guna BMN berupa rumah negara di Kanwil DJPb Provinsi Riau kepada RS Bhayangkara. Dalam Audiensi, Kapolda Riau, Irjen. Pol. Mohammad Iqbal Menyampaikan harapan alih status BMN agar bisa cepat terealisasi dan harus sesuai dengan aturan (Due Process). Salah satu tujuan pembangunan RS Bhayangkara adalah untuk membangun rumah sakit menjadi rujukan sehingga dibutuhkan pelebaran area rumah sakit untuk menambah fasilitas serta akses keluar masuk rumah sakit, sehingga RS Bhayangkara bisa naik kelas.

### Hasil yang dicapai:

Selain meningkatkan sinergi dengan Polda Riau, adanya kesepakatan dalam proses alih guna BMN rumah negara di Kanwil DJPb Provinsi Riau kepada RS Bhayangkara melalui proses audiensi ini.

## 9. Penganugerahan Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA 2023: Indragiri Treasury Award 2024



### Waktu dan tempat:

Rabu, 15 Mei 2024 di Gedung Dang Purnama, Rengat.

### Unit yang terlibat:

Kanwil DJPb Provinsi Riau, KPPN A2 Rengat, dan seluruh mitra kerja KPPN Rengat.

### Rincian kegiatan:

Acara dibuka dengan *keynote speech* oleh Ibu Heni Kartikawati selaku kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian apresiasi kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran Mitra Kerja KPPN Rengat.

### Hasil yang dicapai:

Melalui Indragiri Treasury Award ini, Kementerian Keuangan Riau melalui KPPN A2 Rengat memberikan apresiasi terhadap seluruh Kuasa Pengguna Anggaran Mitra Kerja KPPN Rengat yang terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan anggaran sehingga semakin berkualitas.



## 10. *Sharing Session* Penyaluran Transfer ke Daerah Kabupaten Bengkalis



**Waktu dan tempat:**

Senin, 20 Mei 2024 di ruang rapat Sekretaris Daerah Bengkalis.

**Unit yang terlibat:**

Kanwil DJPb Provinsi Riau, KPPN A1 Dumai, dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

**Rincian kegiatan:**

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau yang menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan. Beliau juga menyampaikan kinerja TKD Kab. Bengkalis tahun 2023 serta Realisasi TKD hingga pertengahan Mei 2024. Kedatangan disambut baik oleh Sekretaris daerah Kabupaten Bengkalis. Beliau juga mengapresiasi atas kinerja Kementerian Keuangan dhi. KPPN A1 Dumai yang tetap mengingatkan dan mengasistensi penyaluran TKD di wilayah Bengkalis. Acara ditutup dengan sesi diskusi dan foto bersama.

**Hasil yang dicapai:**

Melalui *sharing session* ini, Kanwil DJPb Provinsi Riau meningkatkan sinergi yang telah terjalin dengan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Selain itu, kunjungan ini sebagai bagian dari asistensi dan monitoring serta evaluasi terhadap kinerja TKD di daerah dhi. Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

## 11. *Treasury Goes to Campus* Politeknik Bengkalis



*Treasury Goes to Campus* dilaksanakan sebagai rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Bakti Perbendaharaan dengan tema "Dua Dekade Indonesian Treasury, Terus Bertransformasi Dalam Melayani Negeri". Hari Bakti Perbendaharaan merupakan peringatan atas lahirnya Perbendaharaan Negara pada tanggal 14 Januari melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.



**Waktu dan tempat:**

Senin, 20 Mei 2024 di aula Poltekniik Bengkalis.

**Unit yang terlibat:**

Kanwil DJPb Provinsi Riau, KPPN A1 Dumai, dan Poltekniik Bengkalis.

**Rincian kegiatan:**

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau yang menyampaikan apresiasi atas antusiasme para mahasiswa Poltekniik Bengkalis. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Poltekniik Bengkalis. Kemudian, TGC dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber dan games yang menarik. Acara diakhiri dengan penyampaian pesan dan kesan dari para mahasiswa.

**Hasil yang dicapai:**

Melalui TGC ini, Kanwil DJPb Provinsi Riau memperkenalkan APBN dan Dirjen Perbendaharaan kepada para mahasiswa. Selain itu, kegiatan ini juga dalam rangka merayakan Hari Bakti Perbendaharaan ke-20 bersama para elemen kampus Politeknik Bengkalis.

## 12. Konsultasi BKAD Kabupaten Indragiri Hilir



### Waktu dan tempat :

Kamis, 6 Juni 2024 bertempat di Kanwil DJPb Provinsi Riau.

### Unit yang terlibat :

Kasubbid Akuntansi Pelaporan dan tim serta Bidang PAPK Kanwil DJPb Provinsi Riau.

### Rincian kegiatan :

Konsultasi diawali dengan penyampaian maksud dan tujuan kedatangan tim BKAD Kabupaten Indragiri Hilir. Pada kesempatan ini, BKAD Kabupaten Indragiri Hilir melakukan konsultasi terkait penyusunan draft perubahan Perkada tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, utamanya adalah pada aset Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat diklasifikasikan sebagai properti investasi. Selanjutnya, Kepala Seksi PSAPD menyampaikan PSAP 17 terkait properti investasi. Beliau menjelaskan bahwa properti yang termasuk dalam klasifikasi properti investasi adalah properti yang menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset. Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan studi kasus.

### Hasil yang dicapai :

Selain sebagai salah satu wujud peran DJPb sebagai *financial advisor* di daerah, konsultasi ini meningkatkan sinergi dengan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir.

## 13. Audiensi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau



### Waktu dan tempat :

Rabu, 12 Juni 2024 bertempat di Kanwil DJPb Provinsi Riau.

### Unit yang terlibat :

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau dan Kanwil DJPb Provinsi Riau.

### Rincian kegiatan :

Kegiatan diawali dengan penyampaian maksud dan tujuan kedatangan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau yang baru, Triyoga Laksito. Kedatangan beliau disambut baik oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Ibu Heni Kartikawati.

### Hasil yang dicapai :

Meningkatkan sinergi OJK dengan Kanwil DJPb Provinsi Riau meskipun terjadi perubahan pimpinan.

## 14. Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik di Kabupaten Kuantan Singingi



### Waktu dan tempat :

Rabu, 26 Juni 2024 di BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi.

### Unit yang terlibat :

BPKAD dan OPD penerima DAK Fisik di Kabupaten Kuantan Singingi, Kanwil DJPb Provinsi Riau, dan KPPN A2 Rengat.

**Rincian kegiatan :**

Adapun rincian kegiatan sebagai berikut.

- Penyampaian maksud dan tujuan kedatangan tim Kanwil dan KPPN ke BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi yang disampaikan oleh Kepala Bidang PPA II, Bapak Rifai Yusup.
- Pemaparan materi mengenai mekanisme tahapan penyaluran DAK Fisik dan evaluasi kinerja DAK Fisik tahun sebelumnya oleh Bapak Manahan Husor Panaili.
- Sesi diskusi yang dipimpin oleh sekretaris BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi meliputi penyampaian progres tahapan DAK Fisik I dari masing-masing OPD dan konsultasi dengan KPPN A2 Rengat terkait kendala dalam pemenuhan persyaratan penyaluran DAK Fisik tahap I.

**Hasil yang dicapai :**

Selain meningkatkan sinergi antara Kanwil DJPb Provinsi Riau dan KPPN A2 Rengat dengan pemda Kabupaten Kuantan Singingi, kegiatan ini sebagai wujud peran financial advisor di daerah yaitu monitoring dan evaluasi dana transfer. Hal ini diharapkan DAK Fisik yang telah dianggarkan pada Kabupaten Kuantan Singingi dapat salur 100 persen.

**15. Asistensi BLUD RSUD Teluk Kuantan**



**Waktu dan tempat :**

Rabu, 26 Juni 2024 di BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi.

**Unit yang terlibat :**

Bagian perencanaan anggaran BLUD RSUD Teluk Kuantan dan Kanwil DJPb Provinsi Riau.

**Rincian kegiatan :**

Adapun rincian kegiatan sebagai berikut.

- Penyampaian maksud dan tujuan kedatangan tim Kanwil oleh Kepala Bidang PPA II, Bapak Rifai Yusup.
- Melakukan profiling BLUD RSUD Teluk Kuantan meliputi kelengkapan dasar hukum operasional BLUD dan laporan keuangan.
- Sesi diskusi yang meliputi permasalahan yang dihadapi pihak manajemen BLUD dan solusi yang dapat ditawarkan oleh Kanwil DJPb Provinsi Riau.

**Hasil yang dicapai :**

Melalui kegiatan ini, Kanwil DJPb Provinsi Riau mengetahui kendala dalam operasional BLUD sehingga dapat menyelenggarakan pembinaan sesuai dengan BLUD berkenaan.

**16. Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik dan Kinerja Anggaran Kabupaten Siak**



**Waktu dan tempat :**

Jumat, 28 Juni 2024 di BPKAD Kabupaten Siak.

**Unit yang terlibat :**

BPKAD Kabupaten Siak dan Kanwil DJPb Provinsi Riau.

**Rincian kegiatan :**

Adapun rincian kegiatan sebagai berikut.

- a) Penyampaian maksud dan tujuan kedatangan tim Kanwil oleh Kepala Seksi PSAPD, Bapak Anggoro Tri Widyatmoko.
- b) Pemaparan materi mengenai kinerja anggaran Kabupaten Siak oleh Bapak Anggoro Tri Widyatmoko dan mekanisme tahapan penyaluran DAK Fisik dan evaluasi kinerja DAK Fisik tiga tahun sebelumnya (2021 s.d. 2023) oleh Bapak Ade Wahyu Susanto.
- c) Sesi diskusi dan penutup.

**Hasil yang dicapai :**

Selain meningkatkan sinergi antara Kanwil DJPb Provinsi Riau dengan pemda Kabupaten Siak, kegiatan ini sebagai wujud peran *financial advisor* di daerah yaitu monitoring dan evaluasi dana transfer dan kinerja anggaran pemda sehingga DAK Fisik yang telah dianggarkan pada Kabupaten Siak dapat salur 100 persen dan kinerja anggaran yang salah satunya adalah pelaporan keuangan dapat lebih andal.

**17. Kegiatan Kemenkeu Satu Riau sebagai *Regional Chief Economist* (RCE)**

**a. Kanwil DJP Riau**

**1) *Focus Group Discussion* Asosiasi/Lembaga/Perhimpunan se-Provinsi Riau**



**Waktu dan tempat :**

Selasa, 23 April 2024 bertempat di Bertuah Hall Hotel Pangeran Pekanbaru.

**Unit yang terlibat :**

Asosiasi/Lembaga/Perhimpunan se-Provinsi Riau dan Kanwil DJP Riau.

**Rincian kegiatan :**

Melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* dengan Asosiasi/Lembaga/Perhimpunan se-Provinsi Riau dengan tema peningkatan kepatuhan Wajib Pajak guna mendukung implementasi *coretax*/reformasi perpajakan DJP.

**Hasil yang dicapai :**

Wajib Pajak yang tergabung dalam asosiasi/lembaga/perhimpunan di Provinsi Riau dapat menjadi perpanjangan tangan dari DJP untuk menyebarluaskan informasi terkait hak dan kewajiban perpajakan dan implementasi *coretax*/reformasi perpajakan bagi masing-masing anggotanya, sehingga diperlukan FGD untuk meningkatkan pemahaman anggota asosiasi/lembaga/perhimpunan.

**2) Kelas Pajak dan Asistensi Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan**



**Waktu dan tempat :**

Senin, 29 April 2024 bertempat di Aula Hang Tuah Lt.4 Kanwil DJP Riau.

**Unit yang terlibat :**

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Pekanbaru dan Kanwil DJP Riau.

**Rincian kegiatan :**

Kegiatan dimulai dengan sambutan dari Kepala Bidang P2Humas dan Sambutan dari Perwakilan ISEI Kota Pekanbaru Koordinator Provinsi Riau dan dilanjutkan dengan penyampaian materi dan asistensi Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.



**Hasil yang dicapai :**

Menjalin kerja sama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Pekanbaru Koordinator Provinsi Riau dengan melakukan Kelas Pajak dan Asistensi Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan.

**3) Bincang Pajak *On Air* Tim Penyuluh Pajak Kanwil DJP Riau**



**Waktu dan tempat:**

Selasa, 30 April 2024 bertempat di Radio Smart FM Pekanbaru.

**Unit yang terlibat:**

Pendengar Radio Smart FM Pekanbaru dan Tim Penyuluh

Pajak Kanwil DJP Riau.

**Rincian kegiatan:**

*Talkshow* bersama penyiar dari Smart FM dan Tim Penyuluh Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dengan topik pembahasan Pelaporan SPT Tahunan Badan Usaha Tahun 2024. *Talkshow* ini disiarkan secara langsung melalui frekuensi radio 101.8 FM dan melalui kanal Youtube Smart FM Pekanbaru serta Instagram Live @PajakRiau.

**Hasil yang dicapai:**

Tersampaikan informasi seputar tata cara pelaporan SPT Tahunan Badan Usaha dan beberapa solusi atas kendala yang dialami pendengar radio melalui kolom komentar IG Live dan Youtube Live.

**4) Bincang Pajak *On Air* bersama Tim Penyuluh Pajak Kanwil DJP Riau**



**Waktu dan tempat:**

Selasa, 07 Mei 2024 bertempat di RRI Pro 1 Pekanbaru.

**Unit yang terlibat:**

Pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, ahli ekonomi dari UNRI dan Tim Penyuluh Pajak Kantor Wilayah DJP Riau.

**Rincian kegiatan:**

*Talkshow* bersama penyiar dari RRI Pro 1 Pekanbaru, Ahli Ekonomi dari UNRI dan Tim Penyuluh Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dengan topik pembahasan Perubahan Sistem Perpajakan untuk Kemudahan Wajib Pajak. *Talkshow* ini disiarkan secara langsung melalui frekuensi radio 99.1 FM dan melalui kanal Youtube RRI Pro 1 Pekanbaru serta Instagram Live @PajakRiau.

**Hasil yang dicapai:**

Tersampaikan informasi seputar Perubahan Sistem Perpajakan dan beberapa solusi atas kendala perpajakan yang dialami pendengar radio melalui kolom komentar IG Live dan Youtube Live.

**5) *Economy Talk Series 7: Kupas Tuntas Seputar Tren Perpajakan dan Optimalisasi Pajak***



**Waktu dan tempat :**

Sabtu, 11 Mei 2024 bertempat di *Islamic Center*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Unit yang terlibat :**

Organisasi atau komunitas kepemudaan dan Kanwil DJP Riau.

**Rincian kegiatan :**

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kejar Mimpi Pekanbaru ini bertujuan untuk memberikan insight dan informasi kepada audience Kejar Mimpi Pekanbaru seputar isu ekonomi terkini dan menarik pengaruhnya bagi pemuda dalam kesehariannya serta mengedukasi masyarakat khususnya anak muda pekanbaru tentang pentingnya memahami mengenai regulasi dan prinsip perpajakan sebagai bentuk kontribusi dalam perkembangan serta pertumbuhan ekonomi nasional.

**Hasil yang dicapai :**

Kanwil DJP Riau dapat bekerjasama dengan Komunitas Kepemudaan untuk bersama sama membawa hal yang berdampak positif untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia yang lebih maju.

**6) Peningkatan Pemahaman Wajib Pajak Koperasi terkait Kewajiban Perpajakan Koperasi**



**Waktu dan tempat :**

Rabu, 15 Mei 2024 bertempat di Aula UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Pekanbaru.

**Unit yang terlibat :**

UMKM Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Pekanbaru dan Kanwil DJP Riau.

**Rincian kegiatan :**

Sosialisasi penyampaian Hak dan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak UMKM dilaksanakan karena masih banyak UMKM yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung dan berjalan dengan baik.

**Hasil yang dicapai :**

Meningkatkan pemahaman peserta UMKM terhadap Hak dan Kewajiban Perpajakannya.

**7) Sita Serentak Periode II**



**Waktu dan tempat :**

Rabu, 15 Mei 2024 bertempat di lokasi aset sita tiap WP/PP.

**Unit yang terlibat :**

Wajib Pajak/PP dan LJK Perbankan.

**Rincian kegiatan :**

Melaksanakan sita secara serentak yang diikuti oleh KPP di wilayah Kanwil DJP Riau dan telah dilakukan publikasi.

**Hasil yang dicapai :**

Melakukan penyitaan aset sebagai jaminan pelunasan utang pajak sesuai dengan UU PPSP.

**8) Peningkatan Pemahaman Wajib Pajak Koperasi terkait Kewajiban Perpajakan Koperasi**



**Waktu dan tempat :**

Rabu, 29 Mei 2024 bertempat di aula UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Pekanbaru.

**Unit yang terlibat :**

Wajib Pajak Koperasi di Wilayah Riau dan Kanwil DJP Riau.

**Rincian kegiatan :**

Penyampaian materi dilakukan secara langsung oleh pemateri menggunakan aplikasi Ms. Power Point dan Secara keseluruhan kegiatan dapat berjalan dengan baik, materi tersampaikan dengan jelas dan interaksi antara pemateri dan peserta juga terlaksana dengan baik.

**Hasil yang dicapai :**

Terjalin Kerja Sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk memajukan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Peningkatan pemahaman perpajakan dari pengurus koperasi pada Koperasi UMKM.

**9) Sosialisasi Kewajiban Perpajakan Instansi Pemerintah**

**Waktu dan tempat :**

Rabu, 29 Mei 2024 bertempat di Balai Diklat Keuangan Pekanbaru.

**Unit yang terlibat :**



Wajib Pajak Instansi Pemerintah (Bendaharawan) dan Kanwil DJP Riau.

**Rincian kegiatan :**

Penyampaian materi dilakukan secara langsung oleh pemateri menggunakan media power point, Secara keseluruhan kegiatan dapat berjalan dengan baik, materi tersampaikan dengan jelas dan interaksi antara pemateri dan peserta juga terlaksana dengan baik.

**Hasil yang dicapai :**

Menjalin kerjasama dengan Balai Diklat Keuangan Pekanbaru untuk meningkatkan Pemahaman Kewajiban Perpajakan Bendaharawan di lingkungan DJP dalam hal PMK Nomor 59/PMK.03/2022 tentang perubahan PMK nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan & Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah serta PMK Nomor 168 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

**10) In-House Training (IHT) Dukungan Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak di Kanwil DJP Riau**



**Waktu dan tempat :**

Kamis, 3 Juni 2024 bertempat di aula Hang Tuah, Kanwil DJP Riau.

**Unit yang terlibat :**

Seluruh KPP di Kanwil DJP Riau dan Kanwil BPN Prov. Riau (Narasumber).

**Rincian kegiatan :**

Pelaksanaan IHT yang diisi oleh narasumber dari Kanwil BPN Prov. Riau, untuk mengisi materi mengenai:

1. tata cara blokir dan sita berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 13 Tahun 2017
2. layanan informasi publik serta mekanisme perolehan dan pemanfaatan data pertanahan.

**Hasil yang dicapai :**

Dari kegiatan ini diharapkan para penagih pajak/peerta memahami pelaksanaan tindakan penagihan pajak

#### 11) Audiensi Plt. Kakanwil DJP Riau ke Rektor UMRI



**Waktu dan tempat :**

Selasa, 4 Juni 2024 bertempat di Rektorat Universitas Muhammadiyah Riau, Kota Pekanbaru.

**Unit yang terlibat :**

Kanwil DJP Riau, Rektor UMRI dan Civitas Akademika UMRI.

**Rincian kegiatan :**

Kegiatan Audiensi ini dilakukan oleh Plt Kakanwil DJP Riau Imanul Hakim bersama para Kepala Bidang di Kanwil DJP Riau dan diterima langsung oleh Rektor UMRI. Dalam pertemuan tersebut membahas tentang beberapa pandangan ekonomi riau dari Rektor UMRI dan diskusi berbagai kebijakan perpajakan di kalangan masyarakat.

**Hasil yang dicapai :**

Terjalin komunikasi dan sinergi yang lebih erat antara DJP dan tokoh akademisi yaitu Rektor UMRI.

#### 12) Fasilitas dan Kemudahan Perpajakan bagi Wajib Pajak BUM Desa dan BUM Desa Bersama



**Waktu dan tempat :**

Senin, 10 Juni 2024 bertempat di Hotel Furaya Pekanbaru.

**Unit yang terlibat :**

Wajib Pajak BUMDes dan BUMDesma di Wilayah Provinsi Riau dan Kanwil DJP Riau.

**Rincian kegiatan :**

Kegiatan dimulai dengan Pembukaan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil dan dilanjutkan dengan Pemaparan Materi Hak dan Kewajiban Perpajakan BUMDes/BUMDesma dan terakhir diberikan kesempatan tanya jawab bagi peserta kegiatan.

**Hasil yang dicapai :**

Terjalin Kerja Sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil dengan Peningkatan pemahaman perpajakan dari pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) di Wilayah Pekanbaru terkait dengan pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Badan.

#### 13) Audiensi Kakanwil DJP Riau ke Kakanwil DJBC Riau



**Waktu dan tempat :**

Selasa, 11 Juni 2024 bertempat di Kantor Wilayah DJBC Riau, Kota Pekanbaru.

**Unit yang terlibat :**

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Kanwil DJP Riau.

**Rincian kegiatan :**

Dalam rangka mempererat sinergi antar Unit Eselon II Kementerian Keuangan yang berkedudukan di Provinsi Riau, Kepala Kanwil DJP Riau Ardiyanto Basuki berkunjung ke Kantor



Wilayah DJBC Riau dan melakukan audiensi bersama Kakanwil DJBC Riau Agus Yulianto. Kunjungan ini merupakan pertemuan pertama antara keduanya pasca adanya pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dimana Ardiyanto Basuki ditetapkan sebagai Kepala Kanwil DJP Riau menggantikan Plt. Kepala Kanwil DJP Riau sebelumnya.

**Hasil yang dicapai :**

Terjalin komunikasi dan sinergi lebih erat antar unit Eselon II Kemenkeu di Riau terutama DJP dan DJBC.

**14) Peningkatan Pemahaman terkait Hak dan Kewajiban Perpajakan Kelompok Masyarakat**



**Waktu dan tempat :**

Kamis, 13 Juni 2024 bertempat di Hotel Novotel Pekanbaru.

**Unit yang terlibat :**

Wajib Pajak Tenaga Pendamping Desa di Wilayah Provinsi Riau dan Kanwil DJP Riau.

**Rincian kegiatan :**

Kegiatan yang melibatkan masyarakat melalui swakelola masih relatif baru dan belum pernah dilaksanakan sosialisasi terkait perpajakan, sehingga dianggap perlu untuk melakukan sosialisasi agar kelompok masyarakat dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Hasil yang dicapai :**

Menjalin kerjasama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga pendamping desa yang akan melakukan pendampingan kepada Kelompok Masyarakat di Provinsi Riau terkait dengan pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak.

**15) Audiensi Kakanwil DJP Riau ke Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau**



**Waktu dan tempat :**

13 Juni 2024 bertempat di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau.

**Unit yang terlibat :**

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau dan Kanwil DJP Riau.

**Rincian kegiatan :**

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau melakukan audiensi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi (BPKP) Riau di Ruang Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Kakanwil DJP Riau mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kolaborasi aktif dari BPKP dalam berbagai program dan kegiatan DJP selama ini.

**Hasil yang dicapai :**

Menjalin komunikasi dan sinergi lebih erat antara DJP dan BPKP. Salah satu fokus utama Kanwil DJP Riau dan BPKP adalah pengelolaan BUMDes serta peningkatan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan BUMDes di Provinsi Riau.

#### 16) Audiensi Kakanwil DJP Riau ke Kepala Kepolisian Daerah Riau



**Waktu dan tempat :**

Kamis, 13 Juni 2024 bertempat di Mapolda Riau, Kota Pekanbaru.

**Unit yang terlibat :**

Kepala Kepolisian Daerah Riau dan Kanwil DJP Riau.

**Rincian kegiatan :**

Kepala Kantor Wilayah DJP Riau Ardiyanto Basuki berkunjung ke Kepala Kepolisian Daerah Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal. Dalam kunjungan ini, Kakanwil DJP Riau yang didampingi oleh beberapa pejabat DJP di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau memperkenalkan diri dan berkoordinasi mengenai kerja sama antara kedua instansi yang salah satunya dalam bidang penegakan hukum perpajakan.

**Hasil yang dicapai :**

Menjalin komunikasi dan sinergi lebih erat antara DJP dan Polri.

#### 17) Audiensi Kakanwil DJP Riau ke Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau

**Waktu dan tempat :**



Rabu, 19 Juni 2024 bertempat di Kantor OJK Provinsi Riau.

**Unit yang terlibat :**

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau dan Kepala Kantor Wilayah DJP Riau.

**Rincian kegiatan :**

Kepala Kantor Wilayah DJP Riau melakukan kunjungan kerja ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau.

Kunjungan ini merupakan wujud penguatan sinergi dan kolaborasi antar sesama instansi pengelola keuangan di Provinsi Riau. Triyoga Laksito selaku Kepala OJK Provinsi Riau secara langsung menerima kunjungan tim Kanwil DJP Riau.

**Hasil yang dicapai :**

Menjalin komunikasi dan sinergi lebih erat antara DJP dan OJK. Kanwil DJP Riau dan OJK akan senantiasa bergandeng tangan dalam melakukan pengawasan, penegakan hukum serta perlindungan konsumen ataupun wajib pajak di sektor jasa keuangan.

#### 18) Kemenkeu *Corpu Open Class* “Pengelolaan Dana Desa yang Akuntabel” : Materi Kewajiban Perpajakan Instansi Pemerintah Desa



**Waktu dan tempat :**

Jumat, 28 Juni 2024 bertempat di Balai Diklat Keuangan Pekanbaru.

**Unit yang terlibat :**

Wajib Pajak Instansi Pemerintah (Bendaharawan) dan Kantor Wilayah DJP Riau.

**Rincian kegiatan :**

Kegiatan ini dilaksanakan karena Kurangnya pengetahuan perangkat desa terkait hak dan kewajiban perpajakan instansi pemerintah desa serta PMK Nomor 168 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang relatif baru sehingga masih diperlukan pengayaan bagi bendaharawan instansi pemerintah terhadap PMK ini. Kegiatan diawali dengan kata *keynote*

*speech* dari Kepala Kanwil DJP Riau. Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber. Kegiatan diakhiri dengan diskusi antara peserta dengan narasumber.

**Hasil yang dicapai :**

Meningkatkan pemahaman aparat desa dalam melakukan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan ketentuan hak dan kewajiban perpajakan bendahara desa di wilayah Riau.

**19) Layanan Pajak Di luar Kantor dalam Acara Pekan Raya Pekanbaru**



**Waktu dan tempat :**

Kamis s.d. Minggu, 20 Juni s.d. 23 Juni 2024 bertempat di ruas jalan Cut Nyak Meutia.

**Unit yang terlibat :**

Wajib Pajak dan Kantor Wilayah DJP Riau

**Rincian kegiatan :**

Kanwil DJP Riau membuka Layanan Di luar Kantor (LDK) dengan berbagai layanan antara lain asistensi pelaporan SPT Tahunan, pemadanan NIK-NPWP, dan konsultasi perpajakan.

**Hasil yang dicapai :**

Adapun hasil yang dicapai adalah meningkatkan pemahaman Wajib Pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakannya dan publikasi terkait pelaporan SPT Tahunan dan Pemadanan NIK-NPWP.

**20) Layanan Pajak Diluar Kantor pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)**



**Waktu dan tempat :**

Minggu, 30 Juni 2024 bertempat di ruas Jl. Jend. Sudirman No. 247, Pekanbaru.

**Unit yang terlibat :**

Wajib Pajak dan Kantor Wilayah DJP Riau

**Rincian kegiatan :**

Kanwil DJP Riau membuka Layanan Diluar Kantor (LDK) dengan berbagai layanan antara lain asistensi pelaporan SPT Tahunan, pemadanan NIK-NPWP, dan konsultasi perpajakan.

**Hasil yang dicapai :**

Adapun hasil yang dicapai adalah meningkatkan Pemahaman Wajib Pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakannya dan publikasi terkait pelaporan SPT Tahunan dan Pemadanan NIK-NPWP.

**b. Kanwil DJBC Riau**

**1) Media Visit ke Kantor Berita Antara Pekanbaru**



**Waktu dan Tempat:**

Selasa, 11 Juni 2024 di Kantor Berita Antara Pekanbaru.

**Unit/Pihak Terlibat:**

Ketua Biro Antara bersama Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Bea Cukai Riau.

**Rincian Kegiatan:**

Kegiatan diawali dengan penyampaian maksud dan tujuan kedatangan tim Kanwil DJBC Riau. Selanjutnya, ketua Biro Antara

memandu tim Kanwil untuk melakukan office tour. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan plakat dan foto bersama.

**Hasil yang Dicapai:**

Meningkatkan intimacy dengan awak media Antara.

**2) Sosialisasi E-Commerce**



**Waktu dan tempat :**

Kamis, 27 Juni 2024 bertempat di aula Lancang Kuning, Kanwil DJPb Provinsi Riau.

**Unit yang terlibat :**

UMKM binaan Kemenkeu Satu Riau yang berdomisili di Kota Pekanbaru dan sekitarnya dan Kemenkeu Satu Riau yang tergabung dalam pokja UMKM.

**Rincian kegiatan :**

Kegiatan pemberdayaan UMKM ini diawali dengan kata sambutan dari Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan, Bapak Wahyu Prihantoro. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari CEO dan Founder dari Boouraq.com, salah satu situs e-commerce Indonesia yang telah mampu menjadi jembatan dari UMKM lokal yang memiliki kualitas bersaing di pasar ekspor global. Acara diakhiri dengan sesi diskusi dari para peserta kegiatan.

**Hasil yang dicapai :**

Memberikan wawasan kepada UMKM Binaan Kementerian Keuangan Riau mengenai tata cara ekspor.

**c. Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau**

**1) SELANCAR (Selasa Cakap Belajar)**



**Waktu dan tempat :**

Diadakan setiap hari Selasa.

**Unit yang terlibat :**

KPKNL Pekanbaru dan para pelaku UMKM binaan.

**Rincian Kegiatan :**

KPKNL Pekanbaru melakukan *sharing knowledge* dengan para Binaan UMKM terkait berbagai hal untuk meningkatkan kompetensi para UMKM.

**Hasil yang dicapai :**

Peningkatan *stakeholder intimacy* dan peningkatan kapasitas SDM.

**2) Podcast SAMUDERA Bertutur Kupas Lelang Barang Milik Negara/Daerah Bersama BPKAD Riau dan BBKSDA Riau**



**Waktu dan tempat :**

Selasa, 7 Mei 2024 bertempat di KPKNL Pekanbaru.

**Unit yang terlibat :**

Kepala KPKNL Pekanbaru , Plh. Kepala BPKAD Provinsi Riau, dan pengelola/ PIC Lelang BMN BBKSDA Kota Pekanbaru.

**Rincian Kegiatan :**



KPKNL Pekanbaru melakukan *sharing knowledge* dengan metode yang lebih ringan dan santai. Podcast ke-3 ini membawa tema *Lelang Aset Optimal di Era Digital*. *Talkshow* ini membahas tentang *upgrade* pelaksanaan lelang aset, mekanisme lelang dan keuntungan lelang dari sudut pandang pengguna jasa, yang terdiri dari satker vertikal dan pemerintah daerah

**Hasil yang dicapai :**

Peningkatan *stakeholder intimacy* dan peningkatan kapasitas SDM.

**3) Semarak Lelang 116 Tahun dan KPKNL Dumai Fair**



**Waktu dan tempat :**

Kamis, 6 Juni 2024 secara hibrid di KPKNL Dumai.

**Unit yang terlibat :**

Kementerian/Lembaga wilayah kerja KPKNL Dumai, Pemerintah Kota/Daerah di wilayah kerja KPKNL Dumai, para pihak perbankan, dan masyarakat umum.

**Rincian Kegiatan :**

Pelaksanaan kegiatan semarak lelang berupa pelaksanaan lelang online sukarela dan *talkshow* terkait lelang sukarela, serta terdapat para UMKM yang ikut serta memasarkan produk UMKM nya.

**Hasil yang dicapai :**

Edukasi terkait lelang kepada para peserta yang hadir, membantu para UMKM di kota dumai untuk dapat memasarkan produknya pada kegiatan tersebut.

**4) Kolaborasi Pemerintah Provinsi Riau dan Kemenkeu Satu Riau**



**Waktu dan tempat:**

Rabu, 26 Juni 2024 bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau.

**Unit yang terlibat:**

Kemenkeu Satu Riau, Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

**Rincian Kegiatan:**

Rapat koordinasi dalam upaya mendukung program pemerintah untuk memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan komunitas (cluster) petani/pengrajin/koperasi, Indonesia Eximbank berupaya secara konsisten meningkatkan layanan kepada dunia usaha berorientasi ekspor, antara lain dengan menyediakan pelatihan dan pendampingan (*capacity building*) kepada para pelaku UKM berorientasi ekspor dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas untuk ekspor yang berkelanjutan.

**Hasil yang dicapai:**

Peningkatan *stakeholder intimacy* dan peningkatan kapasitas SDM.

**d. Balai Diklat Keuangan Pekanbaru**

**1) Penyelenggaraan KCOC Edukasi dan Bimbingan Teknis Penilaian dalam Rangka Pengelolaan BMN/D yang Optimal**



**Waktu dan tempat:**

Selasa, 25 Juni 2024 di BDK Pekanbaru.

**Unit yang terlibat:**

BDK Pekanbaru, Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepri, BKD Kabupaten Siak, BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, BPD Kabupaten

Bengkalis, BPD Kota Batam, BPD Kota Dumai, BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi, BPKAD Kabupaten Rokan Hilir, BPKAD Kabupaten Rokan Hulu, dan Kejaksaan Tinggi Riau.

**Rincian Kegiatan:**

Adapun rincian kegiatan sebagai berikut.

- Kegiatan dibuka oleh Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepri.
- Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para narasumber
- Diskusi dan tanya jawab
- Penutup.

**Hasil yang dicapai:**

Melalui kegiatan ini para peserta dapat memperoleh dan mengaktualisasikan pengetahuan yang didapat untuk meningkatkan kompetensi teknis terkait penilaian barang milik negara/daerah.

**2) Penyelenggaraan KCOC Pengelolaan Dana Desa yang Akuntabel**



**Waktu dan tempat :**

Jumat, 28 Juni 2024 bertempat di BDK Pekanbaru.

**Unit yang terlibat :**

Balai Diklat Keuangan Pekanbaru, Kanwil DJP Riau, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, dan perangkat desa perwakilan dari desa-desa di Kabupaten Kampar.

**Rincian Kegiatan :**

Adapun rincian kegiatan sebagai berikut.

- Pembukaan .
- Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para narasumber yang berasal dari Balai Diklat Keuangan Pekanbaru, Kanwil DJP Riau, dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
- Diskusi dan tanya jawab
- Penutup.

**Hasil yang dicapai :**

Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas perangkat desa dalam mengelola Dana Desa secara akuntabel.

## D.Kegiatan Tematik

Kegiatan tematik merupakan kegiatan dengan tema atau isu tertentu baik yang berasal dari kebijakan/ arahan pimpinan pusat dan/atau inisiatif Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai hasil sinergi dan kolaborasi dengan pihak lainnya di daerah sesuai dengan karakteristik/kebutuhan di daerah. Bentuk kegiatan tematik berupa kegiatan pelaksanaan tugas *Regional Chief Economist, Financial Advisor* dan kolaborasi Kemenkeu Satu di daerah. Untuk periode triwulan II 2024, kegiatan tematik yang diangkat adalah **“Peningkatan Sinergi Pusat dan Daerah untuk Pengelolaan Keuangan yang Lebih Baik”**. Kegiatan strategis/tematik pada triwulan II tahun 2024 antara lain:

### 1. Rapat Gabungan Perwakilan Kemenkeu Satu Riau



**Waktu dan tempat:**

Senin, 22 April 2024 di Aula Lancang Kuning, Kanwil DJPb Provinsi Riau.

**Unit yang terlibat:**

Seluruh pimpinan dan pejabat/pegawai unit eselon I di Kemenkeu Riau yang tergabung dalam Tim Kesekretariatan Kementerian Keuangan Satu Riau.

**Rincian kegiatan:**

Acara dibuka dengan *keynote speech* oleh Bapak Wahyu Prihantoro selaku kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Riau. Acara dilanjutkan dengan penyampaian laporan kinerja 2023 dan pembahasan rencana kerja 2024 yang disampaikan oleh masing-masing ketua/perwakilan ketua setiap kelompok kerja (pokja) yang telah dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Kemenkeu Riau. Acara ditutup dengan diskusi dan dilanjutkan dengan Halal Bihalal Kementerian Keuangan.

**Hasil yang dicapai:**

Melalui rapat ini, Kementerian Keuangan Riau melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dijalankan oleh masing-masing pokja untuk memitigasi risiko pada program berikutnya dan mengembangkan program kerja yang akan dijalankan pada tahun 2024.

### 2. Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Rangka Implementasi CTAS



**Waktu dan tempat:**

Selasa, 23 April 2024 di Balai Serindit, Komplek Gubernur Provinsi Riau.

**Unit yang terlibat:**

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau yang mewakili Kepala Kanwil DJP Riau, Kepala perwakilan BPKP Provinsi Riau, para Kepala Dinas lingkup kerja Provinsi Riau serta asosiasi/perhimpunan yang ada di Provinsi Riau.

**Rincian kegiatan:**

Kegiatan dibuka dengan *keynote speech* kepala Kanwil DJPb Riau. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari para narasumber dan acara ditutup dengan diskusi dengan para peserta FGD.

#### Hasil yang dicapai:

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, Kanwil DJPb Provinsi Riau mendukung ketercapaian penerimaan perpajakan di Provinsi Riau melalui edukasi kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban mereka dalam menyampaikan SPT tahunan.

### 3. Musrenbang RPJMD dan RKPD Provinsi Riau



#### Waktu dan tempat:

Senin, 24 April 2024 di Balai Serindit, Kantor Gubernur Provinsi Riau.

#### Unit yang terlibat:

Kanwil DJPb Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau, dan Forkopimda Riau.

#### Rincian kegiatan:

Kegiatan diawal dengan pemaparan dari PJ. Gubernur Riau mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau 2025. Kemudian dilanjutkan dengan dengar pendapat dari masing-masing instansi yang hadir untuk RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2045 dan RKPD tahun 2025. Kegiatan ditutup dengan penetapan hasil Musrenbang yang telah disepakati bersama.

#### Hasil yang dicapai:

Melalui kegiatan ini, sinergi antara Kanwil DJPb Provinsi Riau dengan para *stakeholders* khususnya pemerintah provinsi Riau semakin meningkat. Selain itu, keikutsertaan Kanwil DJPb Provinsi Riau dalam Musrenbang juga dapat memberikan *insight* untuk RJPd provinsi Riau yang lebih baik.

### 4. Rapat koordinasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Provinsi Riau Tahun 2024



#### Waktu dan tempat:

Jumat, 3 Mei 2024 bertempat di *Ballroom* Labersa Grand Hotel.

#### Unit yang terlibat:

Kanwil DJPb Provinsi Riau, Pj Gubernur Riau, Direktur Jenderal Pemerintahan Desa, para bupati dan walikota, kepala OPD Provinsi Riau, serta kepala desa dari 1.591 desa yg ada di Riau.

#### Rincian kegiatan:

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Pj. Gubernur Riau. Dalam sambutannya Pj Gubernur Riau menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk membantu desa dalam bentuk bantuan keuangan dan sarana transportasi dalam membiayai operasional desa, bantuan penanganan *stunting* dan bantuan program PKK. Kemudian dilanjutkan dengan *opening speech* dari Dirjen Pemerintahan Desa, Kemendagri. Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari para narasumber. Acara diakhiri dengan diskusi dengan peserta rapat.

#### Hasil yang dicapai:



Kegiatan ini meningkatkan sinergi antar Kanwil DJPb Provinsi Riau selaku penyalur Dana Desa melalui KPPN dengan para kepala desa, DPMD, BPKAD, dan pemerintah daerah khususnya pemerintah provinsi Riau.

## 5. Audiensi Peluang Investasi Syariah Bersama Pj. Gubernur Riau



### Waktu dan tempat:

Kamis, 16 Mei 2024, Bertempat di Kediaman Gubernur Riau.

### Unit yang terlibat:

Kanwil DJPb Provinsi Riau, jajaran Kemenkeu satu Riau lainnya, tim KNEKS dan KDEKS, serta pemerintah provinsi Riau dhi. Pj. Gubernur Riau.

### Rincian kegiatan:

Acara dibuka dengan *opening speech* dari Direktur Eksekutif KDEKS Riau. Beliau menyampaikan harapan dan pembicaraan awal terkait dukungan dan kesiapan BRK Syariah untuk turut mendukung Sukuk dan CWLS. Kemudian dilanjutkan dengan Direktur INSIS KNEKS yang menyampaikan apresiasi atas komitmen dan capaian Provinsi Riau dalam pengembangan Ekonomi Syariah di Riau. Riau memiliki keunggulan dalam bidang keuangan Syariah dan keuangan sosial syariah, diantaranya pengumpulan dan pengelolaan Zakat dan gerakan Wakaf (termasuk wakaf Uang). Hal ini juga diamini oleh Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR, Dwi Irianti Hadiningdyah yang menyampaikan bahwa Riau memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan wakaf dan diharapkan Riau dapat menjadi kota keuangan sosial syariah. Selanjutnya, Pj. Gubernur Riau, SF Hariyanto menyampaikan kesiapan dukungan beliau untuk pengembangan Ekonomi Syariah Provinsi Riau, serta menindaklanjuti Sukuk dan CWLS. Selain itu PJ Gubri juga mengharapkan BRK Syariah untuk dapat memperkuat dukungan terhadap UMKM.

### Hasil yang dicapai:

Acara ini merupakan wujud keikutsertaan Kanwil DJPb Provinsi Riau dalam peningkatan ekonomi syariah di Riau. Selain itu, Kanwil DJPb Provinsi Riau aktif dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah melalui keikutsertaan dalam keanggotaan pada KDEKS dan KNEKS.

## 6. Edukasi dan Sosialisasi Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah dalam Membangun Negeri



### Waktu dan tempat:

Kamis, 16 Mei 2024 di aula Lancang Kuning, Kanwil DJPb Provinsi Riau dan dilanjutkan di aula BRK Syariah Riah

### Unit yang terlibat:

Para pimpinan/perwakilan Kementerian Keuangan Riau, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah, KNEKS, dan DJPPR, BRK Syariah.

### Rincian kegiatan:

Kegiatan dibuka oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan. Kemudian dilanjutkan dengan *keynote speech* oleh Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR, Dwi Irianti Hadiningdyah. Acara selanjutnya adalah pemaparan dari para narasumber yaitu Sutan Emir, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah, KNEKS, Anjar Gumelar, *Head of Wealth Specialist*, Subhan Noor, Kepala Subdirektorat Hubungan Investor, DJPPR Kemenkeu, Hardo Wibowo - Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pembiayaan Proyek SBSN, DJPPR Kemenkeu. Acara ditutup dengan sesi diskusi dan foto bersama.

### Hasil yang dicapai:

Melalui sosialisasi ini diharapkan literasi dan inklusi keuangan syariah dapat terus berkembang di Provinsi Riau.

## 7. FGD Rancangan Perdirjen tentang Petunjuk Teknis Penyusunan LSKP Korporasi Publik



### Waktu dan tempat :

Kamis, 6 Juni 2024 bertempat di aula Lancang Kuning, Kanwil DJPb Provinsi Riau.

### Unit yang terlibat :

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, bidang PAKP, Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN, dan Seksi Supervisi Proses Bisnis Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Riau.

### Rincian kegiatan :

Adapun rincian kegiatan adalah sebagai berikut.

- Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang PAKP Ahmad Juhari.
- Pemaparan materi oleh Hangger Prihandoko, Kepala Seksi PMSKP Subdirektorat SALK beserta tim terkait Rancangan Penyusunan Perdirjen Perbendaharaan mengenai Penyusunan LSKP-KP dan Monev Penyusunan GFS.
- Sesi diskusi dan penutup.

### Hasil yang dicapai :

Hasil yang dicapai dari FGD ini yaitu meningkatkan kualitas laporan GFS Kanwil DJPb Provinsi Riau dan meningkatkan sinergi Kanwil dan KPPN dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

## 8. Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah Provinsi Riau Tahun 2024



### Waktu dan tempat :

Selasa, 11 Juni 2024 bertempat di Balai Serindit Komplek Kantor Gubernur Riau.

### Unit yang terlibat :

Kanwil DJPb Provinsi Riau, para kepala daerah, pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Forkopimda, serta pimpinan satuan kerja baik pusat dan daerah se-Provinsi Riau.

### Rincian kegiatan :

Kegiatan diawali dengan laporan kegiatan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Heni Kartikawati dan sambutan serta arahan dari Pj. Gubernur Provinsi Riau, Ir. H. S.F Hariyanto, M.T. Selanjutnya adalah penyerahan apresiasi atas kinerja anggaran pada tahun 2023 kepada pemerintah daerah dan satker/K/L dari masing-masing kategori. Kegiatan ditutup dengan seminar “Kemandirian Fiskal di Provinsi Riau” yang dipandu oleh moderator Rahmat Setiawan, SE., MBA. (Ketua Lab. Ekonomi Pembangunan UIR) dengan 3 Narasumber yaitu Elly Wardhani, S.H., M.H. (Sekda

Pemerintah Provinsi Riau), Dr. Fadliya, S.E., M.A (Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DJPK), dan Nanang Arifin (PT. Sarana Multi Infrastruktur).

**Hasil yang dicapai :**

Adapun hasil dari kegiatan ini antara lain :

- a) Meningkatkan sinergi Kanwil DJPb Provinsi Riau dengan para *stakeholders* di wilayah Riau.
- b) Memberikan apresiasi terhadap kinerja anggaran tahun 2023 pemda, satker, dan K/L.
- c) Memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja anggaran pemda, satker, dan K/L di tahun 2024.

Meningkatkan pemahaman pemda dalam melihat potensi sumber daya dan mengelola sumber daya yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan potensi pembiayaan yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kapasitas fiskal di daerah.

## E. Kegiatan *Local Expert*

Dalam melaksanakan tugas *Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor*, Kanwil DJPb Provinsi Riau bekerja sama dengan *local expert* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan. Kepala Kanwil. Kegiatan kolaborasi Kanwil DJPb Riau dengan *local expert* terus dilakukan demi meningkatkan kapasitas pegawai dalam menganalisis perekonomian regional sehingga Kanwil DJPb Riau dapat memberikan respons tepat terhadap isu-isu yang sedang terjadi. Kegiatan *local expert* pada triwulan II tahun 2024 antara lain:

### 1. Rangkaian Rapat ALCo s.d. 31 Maret 2024



**Waktu dan tempat:**

Senin, 22 April 2024 di aula Zapin, Kanwil DJPb Provinsi Riau.

**Unit yang terlibat:**

Para pimpinan/perwakilan Kementerian Keuangan Riau yang tergabung dalam pokja RCE dan para *local experts* Riau.

**Rincian kegiatan:**

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau. Acara dilanjutkan dengan pemaparan laporan ALCo Regional Riau yang telah dikompilasi oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Bapak Rifai Yusup. Kemudian, Bapak Dahlan Tampubolon selaku *local expert* Riau menyampaikan analisis tematik mengenai keterkaitan belanja dengan perkembangan capaian dan indikator infrastruktur konektivitas. Selanjutnya, Kepala Kanwil DJP Riau, Bapak Imanul menyampaikan *insight* tentang peningkatan PAD bagi Pemda. Pemaparan diakhiri dengan arahan dari Bapak Wahyu Prihantoro selaku Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau dan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan. Beliau menyampaikan kembali pentingnya ALCo ini agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan.

**Hasil yang dicapai:**

Dalam rapat ini disampaikan isu-isu strategis dan upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan isu tersebut. Selain itu, rapat ini juga meningkatkan sinergi antar eselon I di Kementerian Keuangan Riau sehingga dapat menghasilkan laporan ALCo yang berkualitas dan memotret perkembangan ekonomi di Riau.

### 2. Press Conference APBN Periode Maret 2024



**Waktu dan tempat:**

Selasa, 30 April 2024 bertempat di Aula Lancang Kuning, Kanwil DJPb Riau.

**Unit yang terlibat:**

*Press Conference* dihadiri oleh Kemenkeu Satu Riau dan para awak media.

**Rincian kegiatan:**

Kegiatan dipandu oleh Bapak Rifai Yusup. Kegiatan diawali oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau. Beliau memaparkan mengenai indikator ekonomi makro Riau, kinerja belanja dan dana transfer ke



daerah. Kemudian, acara dilanjutkan dengan pemaparan dari kinerja Kanwil DJP Riau, kinerja Kanwil DJBC Riau, dan kinerja Kanwil DJKN Riau, Sumbar, Kepri yang dipaparkan oleh perwakilan masing-masing unit perwakilan Kementerian Keuangan provinsi Riau. Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya-jawab antara awak media dan para narasumber

**Hasil yang dicapai:**

Melalui *press conference* ini, masing-masing unit perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Riau menyampaikan kinerja sampai dengan Maret 2024 sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

### 3. Rangkaian Rapat ALCo Riau untuk Realisasi s.d. 30 April 2024



**Waktu dan tempat:**

Jumat, 17 Mei 2024 di Aula Zapin, Kanwil DJPb Provinsi Riau.

**Unit yang terlibat:**

Rangkaian rapat ALCo dihadiri oleh Kemenkeu Satu Riau yang tergabung dalam pokja RCE dan para *local expert*.

**Rincian kegiatan:**

Kegiatan diawali dengan pemaparan masing-masing kinerja unit eselon I Kementerian Keuangan di Riau dari kompilasi laporan ALCo. Pemaparan dimulai dari kinerja belanja dan dana transfer ke daerah yang dipaparkan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau. Kemudian, acara dilanjutkan dengan pemaparan dari kinerja Kanwil DJP Riau, kinerja Kanwil DJBC Riau, dan Kanwil DJKN Riau, Sumbar, Kepri oleh masing-masing perwakilan pimpinan. Selanjutnya, pemaparan isu tematik dan reviu laporan ALCo periode April 2024 yang telah dikompilasi oleh para *local expert*, bapak Dahlan Tampubolon dan bapak Muhammad Hidayat. Rapat dilanjutkan dengan sesi diskusi dan dengar-pendapat dari peserta rapat.

**Hasil yang dicapai:**

Rangkaian rapat berjalan lancar dengan diskusi aktif membahas perkembangan APBN, APBD, ekonomi regional, isu regional, dan rekomendasi, serta tematik. Selain itu, kegiatan ini menjadi persetujuan penyajian data pada laporan ALCo periode April 2024 yang diharapkan memberikan *insight*, masukan, rekomendasi untuk menjadi bahan ALCo tingkat daerah yang akan diteruskan ke tingkat pusat demi kemajuan wilayah Riau.

### 4. Rangkaian Rapat ALCo Riau untuk Realisasi s.d. 31 Mei 2024



**Waktu dan tempat:**

Jumat, 17 Mei 2024 di Aula Zapin, Kanwil DJPb Provinsi Riau.

**Unit yang terlibat:**

Rangkaian rapat ALCo dihadiri oleh Kemenkeu Satu Riau yang tergabung dalam pokja RCE dan *local expert*.

**Rincian kegiatan:**

Kegiatan diawali dengan pemaparan masing-masing kinerja unit eselon I Kementerian Keuangan di Riau dari kompilasi laporan ALCo. Pemaparan dimulai dari kinerja belanja dan dana transfer ke daerah yang dipaparkan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau. Kemudian, acara dilanjutkan dengan pemaparan dari kinerja Kanwil DJP Riau, kinerja Kanwil DJBC Riau, dan Kanwil DJKN Riau, Sumbar, Kepri oleh masing-masing perwakilan pimpinan. Selanjutnya, pemaparan isu tematik dan reviu laporan ALCo periode Mei 2024 yang telah dikompilasi oleh *local expert*, bapak Muhammad Hidayat. Rapat dilanjutkan dengan sesi diskusi dan dengar-pendapat dari peserta rapat.

**Hasil yang dicapai:**

Rangkaian rapat berjalan lancar dengan diskusi aktif membahas perkembangan APBN, APBD, ekonomi regional, isu regional, dan rekomendasi, serta tematik. Selain itu, kegiatan ini menjadi persetujuan penyajian data pada laporan ALCo periode Mei 2024 yang diharapkan memberikan *insight*, masukan, rekomendasi untuk menjadi bahan ALCo tingkat daerah yang akan diteruskan ke tingkat pusat demi kemajuan wilayah Riau.

## F. Kesimpulan dan Rekomendasi

### 1. Kesimpulan

Selama Triwulan II Tahun 2024 ini, Kanwil DJPb telah melaksanakan tugas dan fungsi yang dilakukan secara rutin (periodik) maupun strategis dengan tema/isu tertentu yang berasal dari kebijakan/arahan pimpinan pusat maupun inisiatif mandiri sebagai hasil sinergi dan kolaborasi dengan *stakeholders* sesuai dengan karakteristik Provinsi Riau (tematik). Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

- a. **Dalam rangka melaksanakan tugas di Bidang Pelaksanaan Anggaran**, Kanwil DJPb Provinsi Riau telah melaksanakan berbagai kegiatan antara lain monitoring dan evaluasi perkembangan pemenuhan persyaratan DAK Fisik, audiensi dengan para *stakeholders* mengenai pengelolaan keuangan, edukasi dan sosialisasi mengenai literasi keuangan, rapat koordinasi pusat dan daerah dan *treasury award* sebagai bentuk apresiasi atas kinerja anggaran tahun 2023.
- b. **Dalam rangka melaksanakan tugas di Bidang Pembinaan Badan Layanan Umum/Asistensi Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD)**, Kanwil DJPb Provinsi Riau telah melaksanakan asistensi pembinaan BLUD RSUD Teluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. **Dalam rangka melaksanakan tugas di Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**, Kanwil DJPb Provinsi Riau telah melaksanakan berbagai kegiatan antara lain ikutserta dalam penyusunan Perdirjen Petunjuk Teknis Penyusunan LSKP Korporasi Publik, konsultasi dengan para pemda seperti Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Siak mengenai kinerja anggaran.
- d. **Kanwil DJPb Provinsi Riau dalam mendukung budaya kerja Kemenkeu Satu** telah melaksanakan kegiatan seperti *press conference* APBN KiTA Riau untuk realisasi Maret 2024.
- e. **Dalam rangka pelaksanaan kegiatan “Peningkatan Sinergi Pusat-Daerah untuk Pengelolaan Keuangan yang Lebih Baik”**, Kanwil DJPb Provinsi Riau telah melaksanakan kegiatan antara lain rapat koordinasi pusat dan daerah dan *treasury award* sebagai bentuk apresiasi atas kinerja anggaran tahun 2023, keikutsertaan dalam Musrenbang RKPD dan RPJMD Provinsi Riau, serta edukasi dan sosialisasi mengenai literasi keuangan.
- f. **Dalam rangka melaksanakan kegiatan yang merupakan inisiatif sendiri sebagai hasil sinergi dan kolaborasi dengan *stakeholders* sesuai dengan karakteristik daerah**, Kanwil DJPb Provinsi Riau telah melaksanakan kegiatan antara lain ikutserta dalam keanggotaan dan rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau dan rapat TPID Kota Pekanbaru rutin setiap minggu.
- g. **Kegiatan bersama *local expert*** juga terus dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas pegawai untuk menganalisis perekonomian regional yang dilakukan dalam berbagai kegiatan antara lain rangkaian rapat ALCo periode Maret 2023 s.d. Mei 2024 dan *press conference* APBN periode Maret 2024.
- h. **Kanwil DJPb Provinsi Riau melalui FKPN juga terlibat aktif dalam berbagai forum di daerah** antara lain Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Riau, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Riau, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kab. Pelalawan, dan Kab. Kampar, Tim Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (TP3DN) Provinsi Riau, Pembina Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Wilayah Riau, dan Pembina Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Pekanbaru Koordinator Provinsi Riau.

## 2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat kami berikan kepada para pemangku kepentingan antara lain:

### a. Bagi Pemerintah Daerah, BLUD dan BUMD:

- 1) Pemda dapat menjadikan Kanwil DJPb dan Kementerian Keuangan sebagai mitra strategis dalam penyusunan regulasi serta kebijakan daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga diperoleh solusi atas kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Perlu adanya diskusi dan sosialisasi antara para BLUD dan pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan tata kelola BLUD di daerah terkait prinsip fleksibilitas pengelolaan BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### b. Bagi Satuan Kerja Kementerian/Lembaga:

- 1) Satuan kerja K/L perlu mengikuti langkah-langkah strategis yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran serta pelaporan keuangan.
- 2) Dengan adanya dinamika peraturan, kebijakan dan sistem yang digunakan maka satuan kerja K/L perlu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam pengelolaan keuangan negara dan masalah yang ditemui dalam praktiknya.
- 3) Perlu adanya sinergi yang kuat antar unit pemerintah pusat dalam memberikan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM daerah sehingga pengetahuan SDM daerah baik dari sisi teknis maupun sisi non teknis dapat meningkat, khususnya dalam penerusan layanan pemerintah pusat yang telah menjadi kewenangan dan dilakukan oleh daerah.

### c. Bagi Kemenkeu Satu Riau

Perlu dilakukan pertemuan rutin FKPKN bersama internal Kementerian Keuangan dan *stakeholders* dengan mengangkat isu-isu regional yang secara bersama-sama dapat memberikan alternatif-alternatif solusi penyelesaian dan rekomendasi melalui peran aktif pada pokja-pokja yang telah dibentuk.

### d. Bagi Kantor Pusat DJPb

- 1) Menyediakan saluran komunikasi atau PIC yang dapat menghubungkan FKPKN Daerah dengan DJA, DJPK, BKF dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu untuk meningkatkan pengetahuan yang bermanfaat terhadap pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat merumuskan rekomendasi yang tepat dan akurat serta berdasarkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Berkoordinasi dengan Kemendagri untuk membantu penyelesaian permasalahan di Pemda dan BLUD seperti implementasi SIPD, e-BLUD, perkara turunan dari Permendagri 77 Tahun 2020 serta mempercepat penyediaan Satu Data Indonesia yang berisi pagu dan realisasi APBN dan APBD agar dapat dilakukan monev dengan lebih baik.
- 3) Diperlukan *experts*, bidang khusus, dan pelatihan tambahan dalam menjalankan peran DJPb sebagai RCE dan *financial advisor* yang semakin besar.



## Lampiran

### Daftar Partisipasi Kanwil DJPb Provinsi Riau Menjadi Anggota Strategis pada Tim Keuangan di Daerah

No.	Nama Tim	Jabatan	Nomor SK
1.	Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau	Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau sebagai: Anggota	SK Gubernur Riau Nomor Kpts.92/I/2020
2.	Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Riau	Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau sebagai: Anggota	SK Gubernur Riau Nomor Kpts.57/I/2020
3.	Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Riau	Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan sebagai: Anggota Nomor I Komite	SK Gubernur Riau Nomor Kpts.1122/VII/2022
4.	Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Riau	Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau sebagai: Wakil Ketua Harian I	SK Gubernur Riau Nomor Kpts.355/III/2021
5.	Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Pemkot Pekanbaru	Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi Riau sebagai: Wakil Ketua Harian	SK Walikota Pekanbaru Nomor 364 Tahun 2021
6.	Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Pelalawan	Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi Riau sebagai: Wakil Ketua Harian	SK Bupati Pelalawan Nomor KPTS.800/BPKAD/2021/38
7.	Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Kampar	Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi Riau sebagai: Wakil Ketua Harian	SK Bupati Kampar Nomor 970-343/III/2021
8.	Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Dumai	Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi Riau sebagai: Wakil Ketua	SK Walikota Dumai Nomor 970/755/2023
9.	Tim Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Provinsi Riau	Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau sebagai: Anggota Tim Pengarah	SK Gubernur Riau Nomor Kpts.637/III/2022
10.	Pembina Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Wilayah Riau	Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau sebagai: Dewan Penasehat IAI Wilayah Riau	Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI Nomor KEP-02/SK/DPN/IAI/XII/2022
11.	Pembina Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Pekanbaru Koordinator Provinsi Riau	Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau sebagai: Dewan Pembina ISEI Riau	SK Ketua Pengurus Pusat ISEI Nomor S-26/PP-ISEI/X/2022

12.	Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2023	Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi Riau sebagai anggota	SK Kepala Kanwil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau Nomor W4.1817.HN.02.01 Tahun 2023
13.	Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga di Kab. Indragiri Hilir	Kepala Bidang PAPK dan PPA II Kanwil DJPb Provinsi Riau sebagai anggota	SK Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.514/VIII/HK-2022

\*Belum ada perubahan SK Tim sampai FKPKN Triwulan II 2024 ini disusun karena penetapan anggota berdasarkan *ex officio*.